

**IMPLIKASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
POLITIK DI ERA DIGITAL PADA KRITERIA
MEMILIH PEMIMPIN**

(Kajian Ma'anil Hadis)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

MELSYE KURNIA ASTUTI

NIM. 21105050082

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-235/Un.02/DU/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ERA DIGITAL
PADA KRITERIA MEMILIH PEMIMPIN (*Kajian Ma'anil Hadis*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MELSIE KURNIA ASTUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21105050082
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6790a8a882354

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 6791c52243ba0

Penguji II

Asrul, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 679ae463eaf68

Penguji III

Nur Edi Prabha Susila Yahya, S.Th.I., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 679b271ea9340

Yogyakarta, 20 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melsye Kurnia Astuti

NIM : 21105050082

Prodi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : Implikasi Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Era Digital Pada Kriteria

Memilih Pemimpin (*Kajian Ma'ani Hadis*) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 14 November 2024

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MELSYE KURNIA ASTUTI
NIM. 21105050082

**NOTA DINAS PEMBIMBING
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam** Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Melsye Kurnia Astuti
NIM : 21105050082
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Implikasi Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Era Digital
Pada Kriteria Memilih Pemimpin (*Kajian Ma'anil Hadis*)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi
Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk
itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 November 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
NIP: 199012102019031011

Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya Tuhan mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Minta pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah, 153)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melsye Kurnia Astuti

NIM : 21105050082

Program Studi: Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar-benar berjilbab dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya akan menyakup pautkan kepada pihak fakultas. Dengan ini pernyataan saya buat dengan kesadaran dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 November 2024

Penulis



MELSYE KURNIA ASTUTI
NIM. 21105050082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk
Ibu dan Bapak. Orang hebat yang selalu jadi penyemangat
saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia.
Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan
penuh cinta selalu
memberikan motivasi.
Terima Kasih untuk semua berkat do" a dan dukungan ibu dan
bapak saya bisa
berada di titik ini . Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama
lagi.
Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Semoga Allah SWT Senantiasa Memberikan Rahmat dan
Karunianya.

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin merujuk pada SKB Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No.: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā ^ʿ	b	be
ت	Tā ^ʿ	t	te
ث	Śā ^ʿ	ś	es titik diatas
ج	Jim	j	je
ح	Hā ^ʿ	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā ^ʿ	kha	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā ^ʿ	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā ^ʿ	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā ^ʿ	ẓ	zet titik di bawah
ع	„Ayn	...,,...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā ^ʿ	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Hā ^ʿ	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan Rangkap (Syaddah)

مَكِيدِينَ	ditulis	<i>mutaʿaqqidin</i>
كَدَّة	ditulis	„iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

بِهْ	ditulis	<i>hibah</i>
جَزِيَهْ	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

هَكَمَةُ اللَّهِ	ditulis	<i>ni"matullah</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a <i>ḍaraba</i>
contoh: ضَبَّ			
ـِ	kasrah	ditulis	i <i>fahima</i>
contoh : هَفَّ			
ـُ	dammah	ditulis	u <i>u kutiba</i>
contoh : كُتِبَ			

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif contoh: جَالِيَّة	ditulis	ā (garis di atas) <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif maqsur contoh: يَسْكِي	ditulis	ā (garis di atas) <i>yas"ā</i>
3	kasrah + ya mati contoh: مَجِيد	ditulis	ī (garis di atas) <i>majīd</i>
4	dammah + wawu mati contoh: فُرُود	ditulis	ū (dengan garis di atas) <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati contoh: بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati contoh: كول	ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

اھتم	ditulis	<i>a''antum</i>
اكدت	ditulis	<i>u''iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la''in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur''ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis sama dengan huruf qamariyah

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā''</i>

IX. Huruf besar

Huruf Besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوی امفرو د	ditulis	<i>żawi al-furud</i>
اھل اھسن ة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Kepemimpinan perempuan selalu menjadi polemik, padahal sandaran hadis yang digunakan adalah teks hadis yang sama. Karena itu muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa sebuah hadis dapat melahirkan beragam interpretasi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan tematik hadis. Pengumpulan data terkait dengan hadis kepemimpinan wanita didapatkan melalui aplikasi al-maktabah asy-syamilah. Adapun analisa data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) atau lazim disebut analisis takhrij al-hadits dalam hadis, selain itu penelitian ini melalui pendekatan sosio, historis, dan kontekstual. Hasil yang ditemukan mengandung dua sudut pandang, yakni kaum tekstualis dan kontekstualis. Simpulannya, tekstualis mengatakan dengan tegas bahwa menurut hadis ini wanita tidak diperbolehkan untuk memimpin. Sementara kontekstualis juga mengatakan dengan tegas bahwa hadis larangan pemimpin wanita tidak boleh dipahami secara kasat mata teksnya, tetapi dengan menggunakan pendekatan yang tepat, sehingga hasilnya adalah wanita boleh memimpin, baik domestik maupun publik.

Kata Kunci : Kepemimpinan Perempuan, Kritik Hadis, Pendekatan Sosio-Historis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAC

The woman leadership has always been a polemic, whereas the hadits used is the same hadits. Therefore, there are some questions about the hadits interpretation, the question was how could that one hadits arise many interpretations. This research is alibrary research with the thematic hadits approach. The collection of data that concerning of the women's leadership used the application called al-maktabah asy- syamilah. The data analysis used is content analysis or often called by takhrij hadits analysis with the socio, historical, and contextual approaches. The result in this research was found two point of view from the textualists and the contextualists. The conclusion are, the textualist said that according to the hadith women are not allowed to lead. Meanwhile, the contextualist said that according to the hadith too, the women are allowed to lead, domestic nor public.

Keywords : Women's Leadership, Hadith Criticism, Socio-Historical-Contextual Approach



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Tinjauan Pustaka.....	19
F. Kerangka Teori	24
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis penelitian	28
2. Sumber data.....	28
3. Metode Pengumpulan Data	29
4. Teknik Analisis Data.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	33

**BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DI
ERA DIGITAL..... 35**

- A. Pengertian Partisipasi Perempuan Dalam Politik 35
- B. Peran Perempuan Politik 52
- C. Peran Perempuan Dalam Politik Di Era Digital 56
- D. Kesetaraan Gender Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 63

BAB III REDAKSI DAN ANALISIS HADIS TENTANG KRITERIA MEMILIH PEMIMPIN 67

- A. Deskriptif Hadis..... 67
- B. I'tibar Hadis 73
- C. Analisis Sanad Hadis 79
- D. Analisis Matan Hadis..... 88

BAB IV PEMAHAMAN HADIS KRITERIA PEMIMPIN DENGAN METODE YUSUF QARADHAWI DAN IMPLIKASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK..... 95

- A. Pemahaman Hadis Kriteria Memilih Pemimpin Berdasarkan Teori Yusuf Qaradhawi..... 95
 - 1. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk al-Qur'an.... 96
 - 2. Menghimpun Hadis-Hadis Setema 98
 - 3. Memahami Hadis Sesuai dengan Latar Belakang,Situasi dan Kondisi Serta Tujuannya101
- B. Implikasi Partisipasi Perempuan Politik 103
 - 1. Peningkatan Keadilan Kesetaraan Gender 103
 - 2. Peningkatan Representasi Politik Perempuan 109
 - 3. Implikasi Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Pendidikan..... 112

BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah manusia politik (*zoon politicon*). Pada kehidupannya manusia melakukan interaksi sosial politik antara dua atau lebih orang untuk melakukan aktivitas sosial politik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Plato, masyarakat adalah bagian dari *zoon politicon*, dan setiap individu manusia merupakan elemen terkecil dalam suatu negara.¹ Oleh sebab itu, manusia memerlukan wadah atau organisasi untuk mengungkapkan ide dan aspirasinya dalam bidang politik. Berbicara tentang politik tidak bisa dilepaskan dari peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan isu-isu politik. Perempuan memiliki posisi dan peran yang jelas berbeda dalam konteks politik, Persoalan peran dan status perempuan dalam kehidupan masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi hak setiap orang. Namun, ironisnya masih banyak perempuan yang belum memahami hak-haknya dan diskriminasi gender masih berlaku dalam politik Indonesia. Kita harus menyadari bahwa perempuan, yang merupakan mayoritas di Indonesia masih buta terhadap perdebatan politik peran dan status mereka dalam bidang pengambilan keputusan politik masih sangat kecil. Faktanya, terdapat prasangka yang menyebabkan peran dan status perempuan diremehkan secara signifikan.

Secara umum, partisipasi perempuan mencakup

¹ Fox, Dennis & Isaac Prilleltensky. 2015. *Psikologi Kritis Metaanalisis Psikologi Modern*. Bandung : Mizan Media Utama.

semua aspek kehidupan, termasuk bidang politik. Karena perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif, setiap perempuan harus melakukan perjuangan kolektif dan keras di seluruh lini kehidupan, terutama di lini politik, yang berdampak besar pada kebijakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Myron Wiener, partisipasi sukarela berarti tidak ada bentuk pemaksaan, termasuk partisipasi perempuan politik yang didasarkan oleh para komunitas mereka. Pada dasarnya, ini adalah upaya untuk mengeksplorasi dan meningkatkan potensi yang dimiliki perempuan (Muhammad, Husein. 2007)².

Partisipasi politik perempuan merujuk pada aktivitas sukarela yang dilakukan oleh perempuan yang tergabung dalam komunitas kaukus. Kaukus ini terdiri dari banyak unsur, seperti aktivis perempuan, akademisi, anggota parlemen, dan pemimpin partai politik perempuan. Oleh karena itu, praktik politik yang *malestream*, yang didasarkan pada gagasan yang berpusat pada laki-laki dan maskulinitas, mulai mengurangi partisipasi perempuan dalam proses pemilihan. Aliran perempuan yang berlawanan melawan hal ini.

Menurut Mary O'Brien³ pandangan *mainstream*, peran wanita telah didegradasi atau didegradasi. Selain menjadi anggota kelompok sosial yang kurang terwakili, perempuan juga menghadapi kesenjangan struktural yang menghalangi mereka untuk terwakili secara politik dan terlibat dalam perdebatan politik penting. Ini disebabkan oleh fakta bahwa

² Muhammad, Husein. 2007. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.

³ Phillips A (1991) *Engendering Democracy*. Cambridge, UK: Polity Press

representasi formal, yang terkandung dalam politik "presence" atau representasi formal, tidak mudah dan tidak efektif. Oleh karena itu, salah satu masalah terbesar adalah pemahaman tentang keterwakilan perempuan dari sudut pandang material

Di Indonesia hak-hak politik perempuan diatur dalam UUD Republik Indonesia 1945 pasal 28 amandemen keempat.

“Seluruh warga Indonesia laki-laki dan perempuan dijamin kemerdekaan berserikat atau berorganisasi untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan atau tertulis”.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 10 ayat (1) juga menyatakan:

”Warga Negara Republik Indonesia dapat bergabung dengan partai politik apabila telah berusia 17 tahun atau telah menikah”.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi yang diratifikasi berdasarkan UU No. 7 Tahun 1984 Pasal 7 berfokus pada keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan peluang mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria yang digunakan untuk menilai keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan peluang mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Parameter untuk menilai keterwakilan didasarkan pada faktor-faktor berikut: Pertama, perempuan dianggap sebagai anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, Kabupaten, dan Kota. Kedua, mereka dianggap sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan di birokrasi dan kabinet. Semua partai politik dan lembaga seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD harus terlibat dalam memahami kebijakan ini.

Banyak perempuan di Indonesia yang telah lama memperjuangkan kesetaraan untuk waktu yang lama, sementara banyak perempuan lain yang berkontribusi terhadap pembebasan Indonesia dari penjajahan dan

menjadi merdeka. Perempuan yang hidup lebih maju mungkin akan menyaksikan hasil dari perjuangan mereka. Di bidang politik, perempuan pertama kali berpartisipasi dalam politik pada pemilu pertama tahun 1955.

Hak untuk menyatakan pendapat dimiliki oleh setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan harus berpartisipasi aktif dalam politik karena peran mereka sangat penting dalam pengambilan keputusan. Perempuan adalah yang mampu menciptakan kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi mereka merasa aman dalam menegakkan kebijakan tersebut. Menurut Undang Dasar 1945, Pasal 281 (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Untuk mencapai hal tersebut, undang-undang No.7 tahun 1984, yang ditetapkan oleh pemerintah berkewajiban, baik secara individu maupun kolektif, untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak perempuan. Undang-undang ini menetapkan bahwa pemerintah secara individu maupun kolektif bertanggung jawab untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak perempuan (Anifatul, 2019)⁴.

Selain itu, perspektif yang berkaitan dengan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan harus dipertimbangkan. Sepanjang sejarah, perempuan hanya dibatasi untuk bekerja di bidang rumah tangga atau pekerjaan rumah. Selama bertahun-tahun, perbedaan gender dianggap sebagai fenomena biologis yang tidak dapat diubah lagi atau sebagai hasil dari kehendak Tuhan. Sebenarnya, inilah yang menyebabkan ketidaksamaan gender di masyarakat.

Belakangan ini, masalah kesetaraan gender menjadi sangat

⁴ Kiftiyah, Anifatul. 2019. *Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia*. Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak, Volume 14, Nomor 1, Juni.

diperdebatkan. Peran perempuan akan secara bertahap dan pasti menerima hak yang sama untuk pendidikan dan pekerjaan yang sama seperti laki-laki. Saat ini, banyak perempuan yang dapat memperoleh pendidikan tinggi dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka⁵. Masyarakat tidak memiliki kesetaraan gender karena sistem patriarki yang ada didalamnya. Laki-laki menguasai banyak bidang, memungkinkan perempuan perempuan untuk maju. Selain itu, karir perempuan dihalangi oleh stigma masyarakat, yang percaya bahwa perempuan hanya harus mengurus rumah, suami dan anak-anak hal ini ini membuat berkembangnya karir perempuan sulit.

Perempuan politisi harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang lebih luas, seperti mendukung kesetaraan gender dan keadilan. Seseorang dapat melihat tindakan afirmatif terhadap partisipasi perempuan dalam politik sebagai kesempatan untuk mendorong pemimpin perempuan yang seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender.⁶ Kebijakan ini tidak hanya menawarkan peluang untuk mempromosikan pemimpin perempuan, tetapi juga menawarkan peluang untuk mempromosikan pemimpin perempuan yang tidak memiliki hak istimewa.

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi berkontribusi pada perkembangan paradigma komunikasi politik kontemporer. Media sosial, sebagai jenis media modern, sangat penting untuk pendidikan politik. Selain itu, mereka bekerja sama dengan media konvensional untuk mendukung upaya penggalangan dana, menemukan dan mendorong warga yang aktif, dan

⁵ Fatimah, S. (2021). Peran Perempuan dalam Politik: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan di DPR RI. *Jurnal Politik dan Gender*, 7(1), 45–60.

⁶ Aisyah, S. (2019). *Perempuan dan Politik: Representasi, Partisipasi, dan Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

mendukung komunikasi politik internal. Secara khusus, budaya politik, yang merupakan bagian penting dari struktur politik, dapat dipengaruhi oleh media jejaring sosial. Perkembangan media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat kita sama sekali komunikator dan penonton yang mengutamakan persatuan. Budaya politik juga mencakup pandangan hidup, norma, dan orientasi politik. Media sosial memungkinkan berbagai aktivitas, seperti pembuatan konten berbasis komunitas, interaksi sosial, dan situs web. Platform media sosial dapat memudahkan berbagai jenis komunikasi, konten, dan diskusi.

Saat ini, individu, partai politik, dan kandidat dalam kampanye politik menggunakan media sosial secara signifikan untuk berkomunikasi. Kampanye politik yang menggunakan media sosial mengubah perilaku politik, partisipasi, dan masyarakat. Peningkatan penggunaan media sosial yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membuka peluang baru untuk keterlibatan politik dan interaksi sosial. Institusi politik dan partai politik telah memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk berkomunikasi dengan calon pemilih mereka, mengumpulkan informasi, memobilisasi pendukung, dan terlibat langsung dengan masyarakat.

Media sosial dinilai berperan penting sebagai platform perubahan dan pembangunan, serta alat yang efektif dalam menjaring dan merespons keinginan masyarakat. Faktanya, para pemimpin lokal dan nasional menggunakan media sosial untuk berkomunikasi politik dengan masyarakat dan menjaga komunikasi politik di dalamnya. (Hultman, M., 2019).⁷

⁷ Hafizatullah, Salamah & Wangi. (2017). *The usage of social media as a form of external public communication (Case study on Ridwan Kamil as the mayor of Bandung)*. Proceeding of The 4th Conference on Communication, Culture and Media Studies

Pemimpin politik lokal dan nasional merespons permintaan publik melalui media sosial. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa para pemimpin politik dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan warganya tanpa batas dan menciptakan budaya partisipasi, aspirasi, dan kedekatan. Selain itu, media sosial telah mengubah dinamika komunikasi politik secara keseluruhan. Partai politik, masyarakat umum, dan kandidat politik memanfaatkan platform ini untuk terlibat dalam kampanye politik. Kampanye politik di negara-negara berkembang secara sengaja dilakukan secara online, terutama melalui platform media sosial, dibandingkan dengan iklan televisi, debat publik, dan pertemuan tatap muka.

Selain itu, media sosial juga memungkinkan perempuan yang terlibat dalam politik untuk terhubung dengan sesama perempuan lain di dalam dan di luar wilayah mereka. Melalui media sosial, mereka dapat berkolaborasi dalam kampanye politik, bertukar ide, dan strategi serta saling memberikan dukungan satu sama lain. Secara keseluruhan, partisipasi perempuan dalam politik dengan media sosial menawarkan peluang besar untuk mempengaruhi proses politik, memperjuangkan isu-isu gender, dan memperkuat keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik. Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif, perempuan dapat memiliki suara yang lebih kuat dan memainkan peran yang lebih penting dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

Strategi dalam kampanye politik sangat penting untuk studi komunikasi politik karena dapat mengarahkan masyarakat untuk menafsirkannya, sehingga pesan-pesan itu harus relevan dengan

masalah yang berkembang dalam masyarakat⁸. Selanjutnya, istilah “konten media” mengacu pada jenis pesan dan apa yang terkandung di dalamnya. Masyarakat sangat dipengaruhi oleh konten media sosial, yang akibatnya membentuk perilaku sosial mereka. Salah satu perdebatan dalam kajian perilaku politik adalah berkisar kapasitas politik publik dalam mengetahui , memahami dan mengatur isu-isu politik.

Namun, pengaruh penggunaan media sosial dalam kampanye politik masih menjadi perdebatan. Ada pendapat bahwa media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik, mendorong orang untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik dan ikut serta dalam pemilu atau kampanye politik. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penggunaan media sosial dapat menciptakan polarisasi dan gelembung filter. Dengan kata lain, orang terbatas pada perspektif yang sejalan dengan pendapat atau keyakinan mereka, sehingga sulit untuk menemukan perspektif yang berbeda.

Pemerintah adalah lembaga yang dibutuhkan untuk mengarahkan roda tatanan sosial yang adil dalam suatu kelompok sosial. Dalam sebuah pemerintahan, jelas harus ada orang yang mengawasi dan mengontrol aturan yang dibuat. ⁹Oleh karena itu, pemimpin adalah seseorang yang bertanggung jawab atas kontrol utama. Pemimpin juga harus mengawasi dan bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam pemerintahan mereka. Oleh karena itu, pemimpin sangat penting untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil.

⁸ Hidayati, N. (2021). *Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

⁹ Marzuki, M. (2020). *Demokrasi dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Gramedia.

Meskipun pentingnya manajemen sebagai alat dalam kehidupan manusia terus-menerus ditekankan, namun persoalan kepemimpinan sering kali muncul. Pemimpin dalam hal ini bertanggung jawab atas masalah ini. Dalam dunia politik, pemimpin juga dapat memengaruhi organisasi melalui peraturan (*policy*) dan kebijaksanaan (regulasi), yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Selain itu, seorang pemimpin berfungsi sebagai pusat penggerak organisasi. Mereka dapat menggunakan fungsi manajemen untuk membuat keputusan. Bagi umat Islam, kepemimpinan merupakan isu mendasar yang selalu menjadi bahan perdebatan yang serius. Oleh karena itu, persoalan kepemimpinan menjadi sangat penting dalam hukum Islam. Tidak hanya menunjuk pada manusia aja, namun juga hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kepemimpinan yang baik berarti menunaikan amanah dan melakukan ibadah dan berpahala, namun kepemimpinan yang buruk menyesatkan pengikutnya dan menyebabkan mereka diazab diakhirat.

Menurut al-Marwadi, seseorang dapat menjadi pemimpin jika memenuhi tujuh persyaratan. Pertama, seorang pemimpin harus bertindak dengan adil terhadap semua persyaratan tersebut. Kedua, para pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad, menyusun kebijakan hukum, dan merumuskan kebijakan hukum. Ketiga, seorang pemimpin tidak cacat, yang berarti mereka tidak mempunyai cacat fisik. Ini berarti bahwa mereka memiliki indera yang sehat, seperti lidah, penglihatan, dan pendengaran. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan indera mereka dengan benar. Keempat, tidak ada bagian tubuh yang menghalanginya untuk bergerak atau mengangkat dengan cepat. Kelima, untuk membuat kebijakan yang bermanfaat bagi

rakyat, seseorang harus memiliki kemampuan ijtihad yang baik. Keenam, memiliki keberanian dan rasa kepedulian terhadap rakyat, dia dengan gigih membela rakyatnya dan memerangi musuh. Ketujuh, seorang pemimpin harus apakah dia berasal keturunannya nasab dari suku Quraisy (Nugraha, 2016).¹⁰

Imam al-Ghazali pernah berkata, “ Dunia adalah lading akhirat, agama tidak akan lengkap kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama saling terkait, agama bertindak sebagai tiang, sedangkan penguasa atau pemimpin berdiri sebagai penjaga. Bangunan tanpa tiang akan rubuh dan apa yang tidak dijaga akan hilang. Tatanan dan kedisiplinan yang konsisten hanya dapat dicapai di bawah bimbingan penguasa atau pemimpin”. Oleh karena itu, peran seorang pemimpin sangat penting untuk menjamin bahwa agama disampaikan dengan benar dan bahwa masyarakat memiliki keteraturan, ketertiban, dan kedamaian

Sebelum al-Qur'an turun, banyak peradaban besar seperti Yunani-Romawi, India, dan Cina sudah ada dan berkembang. Demikian juga agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha dan Zoroaster di Persia.¹¹ Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak perempuan. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Dalam ajaran Nasrani, perempuan adalah senjata Iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah

¹⁰ Nugraha, A. F. & Atika, M. (2016). *Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15(2), 208-238

¹¹ M. Quraish Shihab, *Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural*, dalam ed. Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perempuan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 77.

perempuan itu manusia atau bukan. Dalam pembahasan tersebut kemudian disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata melayani laki-laki.¹²

Islam datang membawa pesan moral kemanusiaan yang tiada bandingannya dengan agama mana pun. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan, tapi lebih jauh lagi mengajak membebaskan diri dari belenggu ketuhanan yang politeis menuju ketuhanan monoteis. Oleh karena itu, sebenarnya Islam menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan misi dan visi kesetaraan lakilaki dan perempuan. Sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Swt.

Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, masih kontroversi. Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.: Al-Bukhari Kitab al-maghāzi nomor hadis 4073

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْحَكِيمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بَنَتْ كَسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Utssman bin Haitsam telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah

¹² Khurshid Ahmad, Mempersoalkan Wanita (Jakarta: Gema Insani, 1989), hlm.

dia berkata : Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, - yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung ,jika dipimpin oleh seorang wanita".

Tapi di lain pihak, ada ulama lain yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena al-Qur'an memberi isyarat perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin.¹³

Masalah pemilihan pemimpin pada umumnya sama dari waktu ke waktu hanya saja praktiknya semakin kreatif dan inovatif, seperti menggunakan dogma agama, membagikan bahan-bahan kebutuhan ke masyarakat, hingga orasi dengan janji-janji pembangunan yang disertai dengan data data dari periode periode sebelumnya.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan menyebabkan kurang selektif dalam menilai seseorang apakah layak dipilih untuk menjadi pemimpin. Rasulullah dalam hadis sendiri tidak hanya memberikan perintah memilih pemimpin secara mufakat tetapi juga memberikan kriteria-kriteria orang yang pantas dipilih menjadi

¹³ Kepemimpinan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal memimpin, sedangkan urusan umum adalah urusan mengenai berbagai hal yang ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan, jawatan, dinas, dan sebagainya, yang mengurus sesuatu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 864 dan 997.

pemimpin, tetapi dalam melihat hadis tersebut juga perlu dipahami tidak tekstualnya saja tetapi juga kontestual hadis tersebut, sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji hadis dan al-Qur'an lebih mendalam dan memahami maknanya karena tulisan ini memenuhi beberapa kriteria seorang pemimpin sesuai dalam kajian hadis dan al-Qur'an. Oleh karena, itu, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah “ **Implikasi Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Era Digital, Pada Kriteria Memilih Pemimpin (Kajian Ma'anil Hadis).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kriteria memilih pemimpin dalam perspektif hadis?
2. Bagaimana implikasi partisipasi politik perempuan terhadap kriteria memilih pemimpin ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang penulis hendak capai yaitu terjawabnya rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui kriteria memilih pemimpin dalam perspektif hadis
2. Untuk mengetahui implikasi partisipasi politik perempuan terhadap kriteria memilih pemimpin

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk perkembangan studi hadis di Indonesia secara umum, dan khususnya UIN Sunan Kalijaga

2. Secara praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia terkait kriteria pemimpin yang disebutkan dalam hadis.
 - b. Bagi masyarakat, mendorong masyarakat untuk mengambil sikap yang demokrasi secara bijak dan mengedepankan kemashlahatan bersama dalam menentukan sikap politik.
3. Bagi penulis, hasil penelitian akan membantu penulis menyelesaikan tugas akhir studi strata satu (S1) dalam bidang Ilmu Hadis . Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang kepemimpinan perempuan sudah pernah dikaji oleh para peneliti dan juga para sarjanawan sebelumnya. Telaah pustaka meliputi kajian membaca, mencari, menganalisis bahan pustaka dan laporan penelitian yang memuat teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Guna menunjang peneliti yang lebih mendalam mengenai latar belakang masalah, penulis berupaya literatur atau karya-karya sebelumnya yang lebih relevan terhadap topik yang akan diteliti. Mengenai referensi yang relevan dari tema yang terkait yaitu kajian tentang kriteria memilih pemimpin dapat ditemukan di berbagai sumber kitab yang dikenal sebagai kutub tish'ah (*diantaranya Şahih Al-Bukhari, Musnad Ahmad* dan kitab-kitab maupun buku-buku yang terkait dalam kajian penelitian tersebut. Beberapa karya terdahulu yang membahas kepemimpinan perempuan adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Amalia Utami Putri dalam tulisannya yang berjudul “ *Peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik*”. Karena banyak laki-laki yang memandang perempuan sebagai pihak yang lemah, seringkali hanya dianggap sebagai figure demokratis dalam partai politik. Namun, banyak perempuan yang berjasa dan sukses dalam dunia politik yang menyita perhatian publik.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Utami Putri berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Kedua, Penelitian berjudul “*Teori Teori Kepemimpinan*” yang ditulis oleh Syahril Sulthon, Menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan data data yang dikumpulkan dari studi pustaka. Di dalam penelitian ini mencakup delapan teori kepemimpinan, dan hadis yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk aspek kepemimpinan. Penelitian ini mencapai kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah proses bagaimana mengatur dan mencapai kinerja untuk mengambil keputusan kepemimpinan yang sejalan dengan pandangan Islam memerlukan tindakan yang presisi dan akuntabel, baik di dunia maupun dihadapan tuhan di akhirat nanti.¹⁵

Didalam penelitian ini tidak menemukan studi sanad, atau skema sanad hadis, sebaliknya itu mencakup perspektif dari teori kepemimpinan tidak hanya dalam perspektif islam saja tetapi juga dari teori kepemimpinan murni secara tatanan sosial. Peneliti menemukan bahwa belum ada penelitian yang mempelajari konsep memilih pemimpin dalam perspektif hadis yang tepat, karena

¹⁴ Amallia Utami Putri, “*Peran perempuan sebagai anggota partai dalam aktivitas komunikasi politik (studi deskriptif pada partai demokrasi Indonesia perjuangan dewan pimpinan daerah Banten)*” (skripsi), fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan Tan AgengTirtayasa, 2015

¹⁵ SYAHRIL, Sulthon. ”TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN”. Riayah : Jurnal Sosial dan Keagamaan, [S.l.], v. 4, n. 02, p. 208-215, dec. 2019.

penelitian ini hanya mengumpulkan beberapa hadis dan mengupas maknanya tanpa melakukan studi sanad, karena studi sanad sendiri menjadi bagian penting untuk menilai kualitas hadis, jika hadis tersebut kualitasnya dhoif maka tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum, selain itu hanya beberapa penelitian yang melakukan tentang konsep memilih pemimpin dalam perspektif hadis.

Ketiga, Jurnal Syariaah, Juli 2016, dengan judul “*Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam*”, yang ditulis oleh Ghunarsa Sujatnika. Permasalahan yang di bahas adalah banyaknya gagasan tentang pemilihan pemimpin negara dalam Islam, meskipun kita tahu bahwa posisi pemimpin atau khalifah sangat penting dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan, Imam Al- Mawardi berpendapat bahwa ada beberapa syarat bagi orang yang diperlukan untuk dipilih sebagai kepala negara, yakni: *Pertama* , Mereka harus adil secara universal dan memenuhi semua kriteria; *Kedua*, Ilmu yang mampu membuatnya berijtihad terhadap kasus-kasus dan untuk membuat kebijakan hukum; *Ketiga*, kesehatan; panca inderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan lainnya sehingga ia dapat memahami dengan benar dan tepat apa yang dilihat oleh inderanya itu, *Keempat*, kesehatan organ tubuh dari cacat yang menghalanginya berfungsinya dengan cepat dan sempurna, *Kelima*, Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. *Keenam*, Berani dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.

Keempat, Skripsi Arief Hidayat dengan judul Penanggalan Hadis Kepemimpinan Perempuan. Bertujuan untuk mempelajari sejarah hadis dan menentukan kapan mereka menjadi populer. Ia menemukan bahwa hadis ini populer ketika banyak fitnah menyerang kepada sahabat Nabi, hadis ini menjadi populer. Banyak hadis-hadis yang digunakan untuk menjatuhkan lawan, salah satunya adalah hadis ini.

Kelima, uhammad Iqbal menulis dalam bukunya yang berjudul Etika Politik Qur`ani: Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan, dimana ia membahas berbagai istilah dan konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan, kepemimpinan dalam al-Qur`an, penafsiran ayat-ayat tentang kekuasaan, posisi manusia di bumi, hubungan antara agama dan negara, prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan, penegakan etika dalam kehidupan politik, pemihakan terhadap kepentingan masyarakat, dan spiritualisasi kekuasaan politik.

Pada pembahasan hal ini, penulis harus menjelaskan sejauh mana temanya berhubungan dengan studi sebelumnya, bagaimana karya ini berbeda dari studi sebelumnya, dan bagaimana karya ini berbeda dari studi sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian akademik ini akan mempelajari bagaimana partisipasi perempuan

dalam politik berdampak pada persyaratan pemilihan pemimpin. Selain itu, penulis akan mencoba memahami bagaimana teks agama mempengaruhi persyaratan pemilihan pemimpin terhadap pergerakan perempuan di ruang politik, terutama di era digital ini, di mana pergerakan perempuan dalam dunia politik semakin terlihat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep berpikir yang digunakan sebagai wadah untuk menjelaskan variabel atau pokok permasalahan yang ada dalam penelitian¹⁶. Apabila suatu penelitian belum menggunakan teori di dalamnya maka tidak bisa dikatakan sebagai penelitian yang utuh. Dalam hal ini penulis menggunakan Teori Yusuf Qaradhawi dalam melakukan penelitian ini karena beliau adalah seorang ulama modernis yang berpendapat bahwa memahami sebuah hadis memerlukan pemahaman kontekstual dan tekstual. Metode pemahaman Yusuf Qaradhawi dipilih karena penekanannya pada kerangka metodologis dan bagaimana para orientalis menyikapi hadis. Selain itu, metode ini memberikan penjelasan yang komprehensif

¹⁶ Apriani Eka Wulan, "Pengaruh Metode Learning Starts Witha Question Terhadap Kemampuan Menulis Artikel Oleh Siswa Kelas Xisma Negeri I Kualuh Hulu Tahun Pembelajaran 2012/2013," 2012, 7–22

dan relevan tentang bagaimana para orientalis menyikapi hadis..

Tiga ciri utama terdiri dari perspektif Yusuf Qaradhawi: komprehensif (*manhaj syumuli*), seimbang (*manhaj mutawazin*), dan memfasilitasi (*manhaj muyassar*). Ketiga sifat ini akan membantu Anda memahami hadis secara menyeluruh. Akibatnya, ketika berhadapan dengan Sunnah, tiga hal harus dihindari. Pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok ekstremis dalam hal agama (*tahrif al-ghalin*). Kedua, manipulasi oleh orang-orang yang sesat (*intihaf al-mubthilin*), yaitu penipuan terhadap ajaran Islam, yang menghasilkan berbagai inovasi yang jelas bertentangan dengan syariah dan akidah. Ketiga, interpretasi yang dibuat oleh orang bodoh (*ta'wil al-jahilin*). Oleh karena itu, pendekatan moderat atau wasathiyah dapat digunakan untuk mencapai pemahaman yang baik tentang sunnah. Tidak seperti pendapat kelompok ekstrim, salah, dan bodoh.¹⁷

Yusuf Qaradhawi menjelaskan beberapa prinsip utama ekstremisme yang perlu diingat ketika menerapkan Sunnah. Pada awalnya, disarankan untuk mengkaji sunah secara ilmiah, dengan memanfaatkan rantai perawi dan teksnya sendiri. Kedua, seorang

¹⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, hlm. 136

peneliti hendaknya mempunyai pemahaman yang baik terhadap teks hadis sesuai dengan bahasa, konteks, kemunculan, dan tujuannya. Mereka tidak boleh menggunakan penegasan Syhudi Ismail bahwa beberapa hadis perlu dipahami secara kontekstual dan tekstual. Ketiga, seorang peneliti harus memastikan bahwa teks hadis tidak bertentangan dengan bukti yang lebih kuat, baik dari Al-Quran maupun Hadits, dan lebih sejalan dengan tujuan umum Syariah, yang menekankan kualitas positif. Sumber keyakinan ini berasal dari gabungan berbagai sumber dan hukum, bukan hanya satu atau dua.

18

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, Yusuf Qaradhawi membagi pemahaman Hadis ke dalam delapan kategori. Pertama, memahami hadis berdasarkan prinsip Al-Quran. Keduanya mengumpulkan hadis tentang topik yang sama. Ketiga, tarjih, atau kompromi antara dua hadis yang bertentangan. Selanjutnya, sangat penting untuk memahami hadis dalam konteks, situasi, dan tujuan. Kelima, membedakan cara-cara yang berubah-ubah dari tujuan yang tetap. Keenam, membedakan ekspresi literal dari figuratif. Langkah ketujuh adalah membedakan yang terlihat dan yang tak

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode memahami hadis* (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 140.

terlihat. Kedelapan, memastikan arti kata-kata yang digunakan dalam hadis.¹⁹

Selain itu, penulis tidak menggunakan semua delapan kriteria yang disebutkan di atas dalam penelitian ini. Keputusan ini dibuat karena tidak semua standar dapat diterapkan untuk meneliti hadis. Sebaliknya, kriteria harus disesuaikan dengan konteks hadis yang diteliti dan tujuan penelitian. Karena analisis pembahasan tidak memasukkan hadis-hadis yang bertentangan, kriteria ketiga tidak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, karena hadis yang dibahas dalam penelitian ini tidak mengandung ungkapan kiasan, kriteria keenam juga dihilangkan. Akibatnya, tidak ada alasan untuk membandingkan ekspresi literal dan figuratif. , penelitian ini tidak menggunakan kriteria ketujuh. Karena hadis yang dibahas tidak berkaitan dengan alam gaib, penelitian ini tidak menggunakan kriteria kedelapan.

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian harus diterapkan secara sistematis dan logis. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

¹⁹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 7.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai buku, jurnal, tesis, dan literatur lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab-kitab hadis yang ditemukan dalam *al-Kutub al-Tis"ah*. Adapun yang termasuk dalam *al-Kutub al-Tis"ah* yaitu, *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan an-Nasa'I*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan al-darimi*, *Musnad Ahmad*, dan *Muwatha* „*Malik*. Sumber data sekunder berupa karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, seperti *Mu"jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, kitab, buku, jurnal, serta literature yang berhubungan dengan topik yang dibahas sebagai pendukung data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

- a. Takhrij al-Hadis, ialah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab agar diketahui sumber hadis yang bersangkutan dan juga rangkaian silsilah sanadnya untuk mempertimbangkan keotentikan suatu hadis.
- b. Library Research (riset kepustakaan), dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan dan analisa tulisan, buku maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dan berhubungan dengan topik pembahasan, baik data dari kitab atau buku primer maupun sekunder. Setelah data yang dicari didapatkan lalu disusun secara sistematis supaya pembahasan tetap terfokus pada tema utama obyek penelitian. Kemudian dari data-data yang telah terkumpul, Langkah selanjutnya adalah dilakukan telaah yang mendalam mengenai hadis kepemimpinan perempuan supaya bisa menangkap pesan tersembunyi yang ada pada hadis.

c. Pemaknaan hadis, yakni dengan memahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Teknik studi kepustakaan digunakan dalam melakukan pemaknaan secara kontekstual dengan melakukan penelusuran, menganalisis isi teks, mengidentifikasi konteks historis munculnya hadis dan kontekstualisasi hadis. Sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku hadis atau buku-buku lain maupun jurnal yang memiliki kaitan dengan topik yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan data

Untuk memahami hadis metode ma^ʿanil hadis akan digunakan untuk mengolah informasi dan menentukan relevansinya dengan situasi sosial yang objektif saat ini. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa Hadis Nabi tetap relevan meskipun zaman berubah. Untuk mencapai tujuan ini, penulis akan melakukan dua langkah yakni, Pertama, penulis menentukan objek material, dalam hal ini berupa hadis-hadis tentang kepemimpinan dengan membatasi hanya pada kitab-kitab hadis yang terkumpul dalam *al- Kutub al- Tis'ah*. Kedua, mengumpulkan hadis

setema dan hadis yang kontradiktif dengan pembahasan dalam penelitian ini melalui takhrij *bi al-lafz*. Ketiga, untuk menentukan derajat hadis yang diteliti, penulis akan melakukan kritik sanad dan matan hadis. Keempat, penulis akan menganalisis hadis yang dikaji menggunakan metode Yusuf Qaradhawi. Dengan menggunakan metode ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

1. Menghubungkannya dengan al-Qur'an untuk memastikan bahwa hadis yang diteliti tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Ketika hadis bertentangan dengan al-Qur'an, hal ini biasanya terjadi karena hadis tersebut tidak shahih, atau pemahamannya yang tidak tepat, atau diperkirakan sebagai suatu pertentangan itu bersifat tidak nyata dan bukan hakiki. al-Qur'an merupakan ruh eksistensi Islam, bangunan dasar dari hukum-hukum Islam serta sumber pertama dalam Islam. Sedangkan, hadis sebagai sumber kedua dalam Islam, perinci isi al-Qur'an. Ketika hadis bertentangan dengan al-Qur'an, biasanya karena alasan berikut: hadis tersebut tidak shahih, pemahamannya yang salah, atau dianggap sebagai pertentangan tidak nyata. Sementara al-Qur'an berfungsi sebagai

sumber pertama dalam Islam dan merupakan dasar dari hukum-hukum Islam, hadis berfungsi sebagai sumber kedua dalam Islam dan menjelaskan isi al-Qur'an baik secara praktis maupun teoritis. Oleh karena itu, tidak mungkin sebuah hadis shahih memiliki konten yang bertentangan dengan al-Qur'an, yang merupakan rujukan yang jelas dan pasti.

2. Selanjutnya, hadis yang diteliti juga dipahami dengan merujuk hadis lain yang berkaitan dengan topik tersebut. Ini menghasilkan diskusi yang menyeluruh tentang topik tersebut. , baik dalam persoalan yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sehingga, tidaklah mungkin sebuah hadis shahih memiliki kandungan yang bertentangan dengan al-Qur'an sebagai pedoman yang berisi keterangan yang jelas dan pasti.
3. Kemudian, hadis yang diteliti juga dipahami dengan merujuk hadishadis yang setema dengannya agar menghasilkan pembahasan yang komprehensif sesuai topik yang dibahas. Hadis menjadi lebih mudah dipahami dan dapat dilihat karena memiliki

hubungan dan perbedaan baik dari sanad maupun matan.

4. Selanjutnya, penulis menjelaskan konteks, situasi, dan tujuan hadis. Memikirkan alasan mengapa suatu hadis diucapkan dapat membantu Anda memahaminya dengan benar. Hal ini disebabkan fakta bahwa hadis nabi muncul sebagai solusi untuk berbagai masalah yang bersifat maudhu'i, juz'î, dan temporal.
5. Terakhir, penulis mengkonfirmasi arti kata-kata dalam hadis yang dibahas. Penulis memfokuskan penelitian ini pada kepemimpinan perempuan dan hadis terkait kriteria memilih pemimpin.

H. Sistematika Penulisan

Pembicaraan sistematis diperlukan agar penelitian ini disusun secara sistematis. Tema-tema berikut akan dibahas secara rinci dalam penelitian ini:

Bab pertama, membahas latar belakang yang mendasari penelitian ini: rumusan masalah, tinjauan literatur, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab dua, memberikan gambaran umum

tentang perempuan bagaimana perempuan berpartisipasi dalam politik di era modern.

Bab ketiga, memberikan tinjauan redaksional hadis yang menjelaskan kriteria untuk memilih pemimpin. Hadis-hadis tersebut selanjutnya ditakhrij menggunakan alat bantu beberapa software hadis. Untuk mengetahui kedudukan hadis tersebut maka langkah selanjutnya adalah menganalisa sanad dan matan hadis untuk dapat mengetahui kualitas dan kehujjahan hadis.

Bab empat, berisi implikasi pemahaman hadis kriteria memilih pemimpin di era digital. Bab lima , akan menjadi akhir dari tulisan ini. Kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan disertai dengan rekomendasi untuk penulis dan penelitian-penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi politik perempuan di Indonesia terkenal dengan pengakuannya terhadap asas persamaan hak bagi semua warga negara tanpa kecuali, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, kedudukan, atau golongan. Namun, Islam memperlakukan perempuan dengan profesional dan adil, sehingga mendukung perempuan sebagai pelaku politik.

Gagasan keterlibatan politik dalam masyarakat diakui oleh persamaan antara dua sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Kedua sudut pandang tersebut percaya bahwa menjaga keadilan sosial dan menetapkan kebijakan publik bergantung pada keterlibatan politik. Perbedaannya adalah bahwa sudut pandang hukum Islam melihat keterlibatan perempuan dalam kerangka syariah, atau hukum Allah, sedangkan perspektif hukum positif melihatnya dalam kerangka hukum yang berlaku di suatu negara atau sistem hukum tertentu. Hukum Islam biasanya mengatur partisipasi politik berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, persatuan, dan kesetaraan. Di sisi lain, hukum positif biasanya mengatur partisipasi politik berdasarkan hukum yang berlaku, seperti

peraturan yang menetapkan persyaratan untuk pencalonan untuk pemilihan umum.

Setelah melalui proses pencarian pemahaman hadis tentang kriteria memilih pemimpin yang bertanggung jawab, dengan menggunakan metode Yusuf Al-Qaradhawi baik bagi dari pemahaman dan kontekstualisasi, ditemukan hasil beberapa yang dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, kepemimpinan perempuan dalam politik dijelaskan dalam hadis Bukhari nomor 4703. Baik dari segi sanad maupun matan, hadis Bukhari nomor 4703 merupakan hadis yang shahih. Sunan at-Tirmidzi nomor 2188, Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 19507, Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 19612, Hadits yang diriwayatkan Sunan An-Nasa'i nomor 5293 dan Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 1995 merupakan beberapa riwayat yang memuat hadis ini.

Berdasarkan metode Yusuf Al-Qaradhawi, hadis bukhari nomor 4703 tidak dapat dijadikan dasar mutlak untuk menolak kepemimpinan perempuan. Hadis ini bersifat kontekstual, bukan hukum universal. Dalam system modern, perempuan dapat menjadi pemimpin selama memenuhi kriteria keadilan, kompetensi, dan masalah bagi masyarakat.

B. Saran- Saran

Penelitian dalam skripsi ini mengenai kepemimpinan perempuan dalam politik dalam hadis belum bersifat final, karena masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Penulis dalam memahami hadis Riwayat Shahih Bukhari nomor 4703 tentang kepemimpinan perempuan dalam politik menggunakan metode pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi yang masih terbatas pada pemaknaan hadis saja. Oleh karena itu, tedapat banyak ruang untuk penelitian yang lebih lanjut yang melibatkan berbagai cara dan perspektif. Kajian yang lebih luas dan mendalam tentang pembahasannya dengan bekerja sama dengan berbagai disiplin keilmuan pasti akan menghasilkan pemahaman yang beragam dan menarik. Penulis, bagaimanapun, sangat berharap hasil skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta diskusi tentang kepemimpinan perempuan, terutama dalam bidang studi hadis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz. VI (Beirut Dar al Ihya' al Turath al 'Arabi, n.d.). 6. 40 Jurnal Mu'allim Vo;. 6 No. 1 Januari 2024
- Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Juz. XII, 2 ed. (Beirut: Dar al ihya' al Turath al 'Arabi, n.d.). 210.
- Albi Anggito Setiawan Johan, Metodologi penelitian kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Alfatih Suryadilaga, Kontekstualisasi Hadis dalam Kehidupan Berbangsa dan alaya, *Jurnal Kalam*, Vol. 11, no. 1, Juni 2017, hlm. 217.
- Al-Tahhan, Metode Takhrij Al-Hadith Dan Penelitian Sanad Hadis, 33
- Ani Widayani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005) hlm. 24-27
- Antari, Luh Putu Swandewi. 2023. “*Perempuan Dan Politik Indonesia.*” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6 (1): 18–23. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.798>.
- Arif, S. (2018) *Kriteria Pemimpin Perspektif Al Qur'an*. An-Nahdhah, 12(2), 181-191
- Budi, Retno, Lestari, “Tekhnologi Informasi dan Pemberdayaan Perempuan”, *Jurnal Tekhnologi dan Informatika* Vol. 1 No. 1, (2011)
- Elvi Muawanah, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Penerbit TERAS), 2009, hlm. 157.
- Folkerts, J., Lacy, S., Larabee, A. (2008). *The Media in Your Life: An Introduction to Mass Communication* (4th ed.) Boston: Pearson Cavazza, F. 2012 Education Inc.

- Fox, Dennis & Isaac Prilleltensky. 2015. Psikologi Kritis Metaanalisis Psikologi Modern. Bandung : Mizan Media Utama.
- Gaib, H., & Dkk. (2017). Profil Perempuan Indonesia 2017. (Santosa Didiek, Ed.). Jakarta: KP3A.
- Hafizatullah, Salamah & Wangi. (2017). The usage of social media as a form of external public communication (Case study on Ridwan Kamil as the mayor of Bandung). Proceeding of The 4th Conference on Communication, Culture and Media Studies
- Hamid, A. (2015) *Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan Dan Negara Menurut Al-Mawardi*, Jurnal A'dliya, 9 (1), 85-98
- Hasbi Ash-Shiddieqy Tafsir Al-Bayyan ,, Jil. 1 (Jakarta al-ma'arif, 1977)hlm. 311
- Katz, E., Blumer J. G. Dan Gurevitch, M. (1974). Utilization of Mass Communication by The Individual, dalam J.G. Blumer dan E. Katz (eds), The Uses of Mass Communication. Beverly Hills: Sage.
- Kiftiyah, Anifatul. 2019. Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak, Volume 14, Nomor 1, Juni.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati) hlm. 480
- M. Rusydi "Perempuan di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi)" Jumal An-Nisa'a Vol. 7, No. 2, Desember 2012, him. 77.
- Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 367

- Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *POLITIK ISLAM Ta'liq Siyasaah Syari yah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. (Jakarta Griya Ilmu)
- Mujar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Cet. XI; Jakarta: Erlangga, 2008 M.), h. 124.
- Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu" i: Solusi al- Qur"an atas Masalah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 205
- Nugraha, A, F. & Atika, M. (2016). *Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasaah. Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15(2), 208-238
- Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2007), hlm. 313.
- Nurul Hidayah, *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*, Skripsi (Mataram, Universitas Muhammadiyah)
- PR, R. G. Komunikasi Politik Chusnunia Chalim (Studi Terhadap Kampanye Politik Chusnunia Chalim Dalam Memenangkan Pemilu Pilkada Lampung Timur Tahun 2015 (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah RK (Jurnal Riset Komunikasi), 10(2).
- Pudji, Astuti, Tri M, “Bias Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, INFOKAM, No.II/ Sempember/07.
- Rasyidin, and Fidhia Aruni. 2016. “*Gender Dan Politik: Keterwakilan Wanita Dalam Politik.*” Unimal Press, no. April: 4.
- Sahiron Syamsuddin, “KAIDAH KEMUTTASILAN SANAD HADIS (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi

Ismail),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‘an Dan Hadis* 15, no. 1 (13 Januari 2014): 17

Subiakto. H & Ida, R. (2014). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi* Jakarta: Kencana Prenamedia Group

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, hlm. 136

Via Susanti, *SKRIPSI Model Kepemimpinan Bilqis dalam Al-Qur'an* (Surakarta: 2019) hlm.7. 5

West, Richard, Lynn H.Turner. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi* (Buku 2) (Edisi 3). Jakarta: Salemba Humanika.

Wibowo, D. E. (2011). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. *Gender*, 3(1), 356-364.

Zuraidah, D.N., Apriyadi, M.F., (2021). Menelusik platform digital dalam I teknologi bahasa pemrograman. *Teknis Jurnal: Jurnal Ilmiah Teknologi dan Sains*, 11(2), 1-6

